



LAPORAN KINERJA (LKJ) 2023

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUKABUMI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi atas target kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2023.

Laporan ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan di awal Tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan Pertanian Kabupaten Sukabumi yang maju dan sejahtera, melalui pengelolaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan disusunnya laporan ini akan dapat diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Palabuhanratu, Februari 2024

Kepala Dinas



SRI HASTUTY HARAHAHAP, SP, MSE, MA

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19741019 199903 2 008

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari SAKIP sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP di dalam peraturan tersebut mempunyai arti rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Dimana Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Instansi Pemerintah, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*).

Salah satu wujud perubahan dalam program reformasi birokrasi, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berupaya mendukung Pembangunan Pertanian secara sistematis, berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta *Good Governance*. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati Sukabumi. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 merujuk pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Dinas yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sukabumi dalam melaksanakan urusan di Bidang Pertanian dan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang harus disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan untuk memberikan informasi kinerja Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini adalah sebagai acuan dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian selama 1 (Satu) tahun. Sasaran Strategis Dinas Pertanian adalah Meningkatnya Produksi Pertanian dengan Indikator Sasaran yaitu (1) Persentase

Peningkatan Produksi Pertanian. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pilihan yaitu urusan pertanian melalui lima (5) program yaitu :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- d. Program Perizinan dan Usaha Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian

Selain sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilaksanakan, Laporan Kinerja Tahunan juga sebagai media umpan balik dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanian untuk tahun-tahun berikutnya dalam melaksanakan Program/ Kegiatan dalam rangka meningkatkan PDRB sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan daerah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang sarana tanaman pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan, bidang prasarana dan penanggulangan bencana pertanian, bidang penyuluhan dan pengembangan usaha; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- e. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- f. Pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian
- g. Pengelolaan sumberdaya genetic pertanian;
- h. Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian;
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

- j. Pengelolaan Kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- k. Penyelenggaraan dan pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;
- l. Penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;
- m. Pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;
- o. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
- p. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Sarana Pertanian, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Sub Koordinator Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian
4. Kepala Bidang Prasarana dan Penanggulangan Bencana Pertanian, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c. Sub Koordinator Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

5. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian
 - b. Sub Koordinator Kerjasama dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - c. Sub Koordinator Penatausahaan Pertanian
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 119 orang PNS, berikut adalah kondisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan :

- a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dari jumlah pegawai 119 Orang yang menduduki jabatan struktural ada 21 orang dengan rincian :

- 1) Pejabat eselon II : 1 orang
- 2) Pejabat eselon III : 3 orang
- 3) Pejabat eselon IV : 17 orang

- b. Berdasarkan Golongan :

Dinas Pertanian memiliki pegawai berdasarkan golongan dengan rincian:

- 1) Golongan IVc : 01 orang
- 2) Golongan IV b : 13 orang
- 3) Golongan IV a : 14 orang
- 4) Golongan III d : 20 orang
- 5) Golongan III c : 12 orang
- 6) Golongan III b : 25 orang
- 7) Golongan III a : 09 orang
- 8) Golongan II d : 05 orang
- 9) Golongan II c : 18 orang
- 10) Golongan II b : 01 orang
- 11) Golongan II a : 01 orang

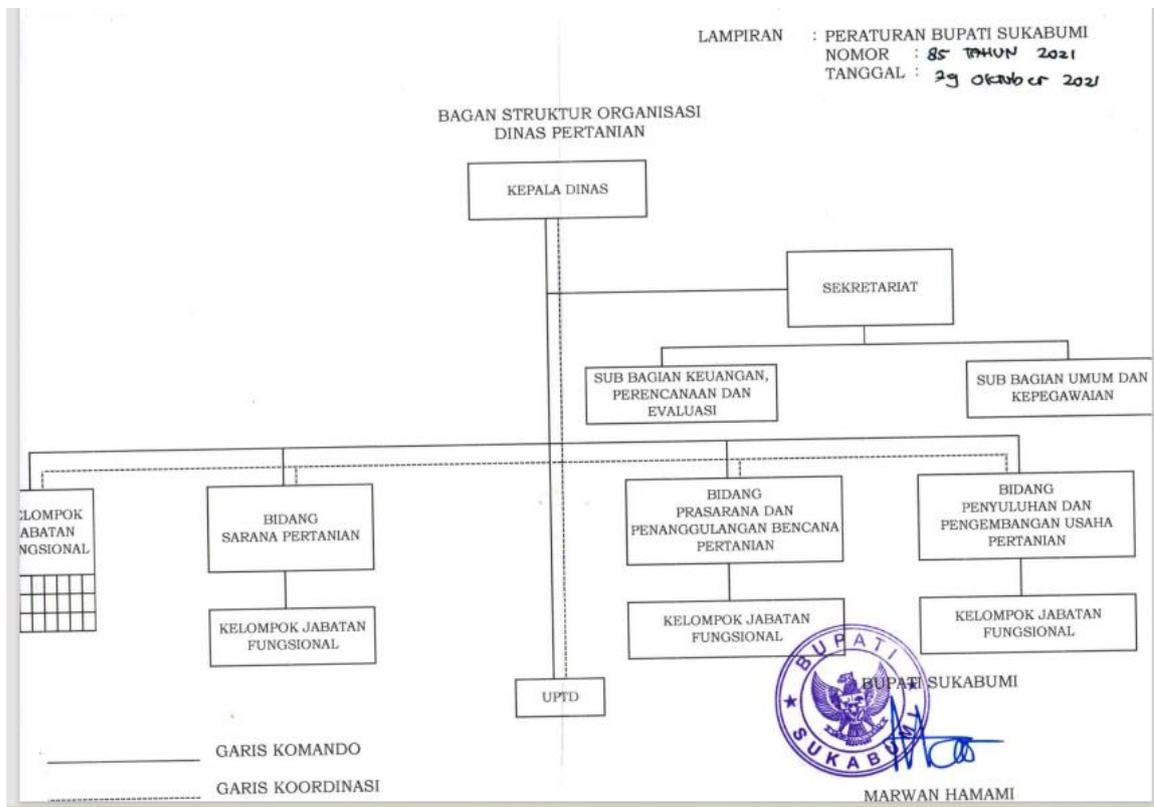
- c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 119 orang pegawai Dinas Pertanian, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dari SLTA hingga Pasca Sarjana dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pasca Sarjana (S2) : 6 orang
- 2) Sarjana (S1) : 75 orang
- 3) Diploma III : 12 orang
- 4) SLTA sederajat : 43 orang

Fasilitas pendukung yang dimiliki Dinas Pertanian selain bangunan kantor Dinas Pertanian adalah Bangunan Balai Benih Induk di Kecamatan Gunung Guruh dan Cicurug, 6 Buah Bangunan UPTD yaitu Kecamatan Baros, Cibadak, Cisolok, Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten. Kebun dinas sebanyak 7 Lokasi yaitu di Kecamatan Baros, Gegerbitung, Cisolok, Jampangtengah, Jampangkulon, dan Ciracap. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 47 Unit tersebar di 47 kecamatan.

Berikut adalah Struktur organisasi di Dinas Pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

1.4 Isu-isu Strategis

Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi 2021 - 2026, memiliki focus pada 5 (Lima) isu, yaitu (1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Permasalahan Sosial, dan Ketahanan Bencana; (3) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah; (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Pendukung Aktivitas Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan (5) Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Isu ke-3 *“Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan Peningkatan Keterkaitan Antar Sektor dan Antar Wilayah”* merupakan isu strategis sector pertanian. Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; dan perdagangan. Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Sukabumi terhadap perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan selama sepuluh tahun terakhir. Secara nilai besarnya selalu meningkat, namun laju pertumbuhan sektor pertanian terus mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil.

Sementara itu permasalahan yang dihadapi dalam sektor primer yaitu nilai tambah dan produktivitas dari pelaku usaha pertanian yang masih rendah, aktivitas ekonomi pertanian dari hulu hingga hilir belum terintegrasi, pelaksanaan pengembangan sektor peternakan dan perikanan yang belum optimal, ketidakpastian cuaca, musim, dan hama, rendahnya regenerasi petani, dan tingginya alih fungsi lahan sehingga menurunnya luas lahan pertanian dan menyebabkan rendahnya penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani. Alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman, peningkatan infrastruktur, maupun aktivitas penunjang ekonomi lainnya. Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian yang tidak dilindungi, sehingga beralih fungsi menjadi peruntukan lain. Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka pemerataan infrastruktur dan ekonomi haruslah memerhatikan

daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara garis besar permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian berkaitan dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah petani;
- b. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
- c. Rendahnya regenerasi SDM di sector pertanian;
- d. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal;
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian;
- f. Data pertanian yang belum rapi;
- g. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian yaitu hanya sebesar 0,3 ha per rumah tangga petani (sensus pertanian, 2013);
- h. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya proteksi lahan pertanian produktif (LP2B).

1.5 Sistematika Penyajian LKJ 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2020 tentang Pedoman SAKIP Daerah, Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian

Renstra Dinas Pertanian 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Pertanian yang akan dilaksanakan langsung oleh semua jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi pada kurun waktu 2021 - 2026, dengan penekanan pada pencapaian Sasaran Strategis Daerah (RPJMD 2021 - 2026) dan diselaraskan dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat (RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023) dan Prioritas Nasional (RENSTRA Kementerian Pertanian RI 2020-2024).

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani dan kebun, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perkebunan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi non pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keterkaitan antara renstra Kementerian Pertanian RI, renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

- I. Mewujudkan ketahanan pangan;

2. Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian;
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian/hilirisasi produk pertanian;
4. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana pertanian;
5. Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan akses pasar dan permodalan.

2.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan isu strategis permasalahan di sector Primer khususnya subsector pertanian dan sebagaimana Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta diselaraskan dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk mencapai Kabupaten Sukabumi lebih baik ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam mencapai pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 yakni **Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif**, yang merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa. Elemen yang kedua adalah **“Masyarakat Sejahtera Lahir dan Bathin”**. Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai.

Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, yaitu :

- 1) Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
- 3) Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Dari keempat Misi tersebut yang terkait dengan Pembangunan Pertanian adalah Misi yang Kedua yaitu ***“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi berbasis Agribisnis dan Pariwisata berkelanjutan”***.

Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah dan kondisi topografi yang cukup bervariasi memiliki sumberdaya alam yang melimpah yang bisa dijadikan unggulan wilayah, potensi unggulan tersebut meliputi sektor pertanian dan perkebunan.

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, komoditas pertanian yang menjadi penyumbang besar dalam perekonomian meliputi komoditas padi, jagung, kedelai dan ubikayu. Komoditas pertanian lainnya yang juga merupakan unggulan Kabupaten Sukabumi adalah komoditas Hortikultura seperti bunga, daun potong, sayuran, buah-buahan dan biofarmaka.

Sektor Perkebunan berkontribusi tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga dari sisi ekologi dan social budaya. Pemanfaatan lahan untuk perkebunan mencapai 25% dari total luas daratan di Kabupaten Sukabumi.

Perekonomian daerah dibangun atas dasar meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten

Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititik beratkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sector pariwisata juga bias menjadi alternative strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selainitu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sector tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2021 - 2026

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sedangkan sasarannya meningkatnya produksi pertanian, hal ini merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran *impact* pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat dirunut dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran | Kondisi Kinerja Periode RPJMD | | Target | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 2020 (Realisasi) | 2021 (Proyeksi) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN | | | | | | | | | | |
| Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan | | | | | | | | | | |
| T2 : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya produksi pertanian | Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) (Persen) | -1,08 | 1,23 - 2,23 | 2,30 - 3,30 | 3,61 - 4,36 | 4,75 - 5,42 | 4,89 - 5,49 | 5,05 - 5,55 | 5,05 - 5,55 |
| | | Meningkatnya produksi pertanian | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 10% |

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

| Tujuan | Sasaran Strategis | Strategi | Arah kebijakan |
|---|--|---|---|
| Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin | | | |
| Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan | Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan | Ektensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan |
| | | | Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis |
| | | | Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis |
| | | | Mencetak agripreneur milenial yang potensial |
| | | | Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan perikanan |
| | | | Optimalisasi peran |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sektor pertanian, dan perikanan |
| | | | Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan |
| | | Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sektor pertanian dan perikanan, yaitu mendorong kemudahan aksesibilitas pembiayaan/permodalan agribisnis bagi para pelaku usaha pertanian dan perikanan | Mengembangkan skema <i>closed loop</i> dalam peningkatan nilai tambah pertanian |
| | | | Optimalisasi sektor swasta pada industri hilir komoditas pangan |

Strategi dan arah kebijakan Dinas pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No 050 tahun 2020 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan Dinas pertanian untuk periode Renstra 2021-2026 secara rinci tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian 2021 - 2026

| Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan. | | | |
|--|---------------------------------|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. | Meningkatnya produksi Pertanian | Mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan sarana bidang pertanian | Penggunaan sarana pertanian yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan |
| | | Mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan prasarana bidang pertanian | Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan infrastruktur pertanian |
| | | Meningkatkan pengendalian OPT dan penanggulangan dampak perubahan iklim | Peningkatan pengendalian dan penanggulangan OPT dan dampak perubahan Iklim |

| Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan. | | | |
|--|---------|---|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | | Meningkatkan efektivitas perizinan usaha pertanian | Penerapan izin usaha pertanian yang sesuai aturan perizinan usaha |
| | | Meningkatkan kapasitas ketenagaan penyuluh, penyelenggaraan penyuluhan dan kapasitas kelembagaan Patani | Pemberdayaan peran dan fungsi BPP serta efektivitas kelembagaan petani |

2.1.4. Program dan Kegiatan

Penyusunan program pembangunan pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi serta sesuai misi ke-2 Kabupaten Sukabumi yaitu *Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan*. Program prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja, dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023

| NO. | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|-----|---|---|--------|--------|
| 1. | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | % | 100 |
| 2. | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | % | 100 |
| 3. | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi | % | 100 |
| 4. | Perizinan Usaha Pertanian | fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian | % | 100 |
| 5. | Penyuluhan Pertanian | kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | % | 100 |

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu

peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Pertanian | Peningkatan Produksi Pertanian | % | 2 |

Dinas Pertanian yang mendukung Misi ke II (Dua) Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi dengan tujuan dan sasaran seperti tercantum pada Tabel 6. Dalam tabel dapat dilihat indikator dari sasaran dan program kegiatan serta anggaran untuk mencapai indikator kerjanya

Tabel 6. Alokasi Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

| Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi berbasis Agribisnis dan Pariwisata berkelanjutan | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------|--|--|---------------|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | | Anggaran (Rp) |
| | | | | Satuan | Target | Program | Kegiatan/ SubKegiatan | |
| 1. | Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Produksi Pertanian | Peningkatan Produksi Pertanian: | % | 2 | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 5.992.724.900 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 3.898.204.900 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 2.094.520.000 |
| | | | | | | | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 520.000.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDH Hewan/Tanaman | 520.000.000 |

| Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi berbasis Agribisnis dan Pariwisata berkelanjutan | | | | | | | | |
|---|--------|---------|-------------------|------------|--------|---|---|----------------|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | | Anggaran (Rp) |
| | | | | Satuan | Target | Program | Kegiatan/ SubKegiatan | |
| | | | | | | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian | 652.351.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 518.926.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 10.000.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 123.425.000 |
| | | | | | | | Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | 54.910.612.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 38.651.592.500 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | 1.109.734.500 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 13.544.822.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit | 806.425.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 798.038.000 |
| | | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 150.575.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan | 23.245.000 |

| Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi berbasis Agribisnis dan Pariwisata berkelanjutan | | | | | | | | |
|---|--------|---------|-------------------|------------|--------|------------------------------|--|---------------|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | | Anggaran (Rp) |
| | | | | Satuan | Target | Program | Kegiatan/ SubKegiatan | |
| | | | | | | | Perkebunan | |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 26.250.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 10.938.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 90.142.000 |
| | | | | | | Perizinan Usaha Pertanian | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 115.000.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | 15.000.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 5.000.000 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | 95.000.000 |
| | | | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 4.369.600.100 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 2.856.520.100 |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 100.000.000 |

| Misi 2 | : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi berbasis Agribisnis dan Pariwisata berkelanjutan | | | | | | | |
|--------|---|---------|-------------------|------------|--------|---------|---|---------------|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | | Anggaran (Rp) |
| | | | | Satuan | Target | Program | Kegiatan/ SubKegiatan | |
| | | | | | | | - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1.413.080.000 |

Untuk alokasi anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian Tahun 2023 disajikan pada tabel 7 sesuai dengan sasaran strategis pembangunan pertanian dan sasaran strategis kegiatan rutin Dinas Pertanian (minus Belanja Pegawai).

Tabel 7. Anggaran Belanja Daerah Per Sasaran Strategis (tanpa Belanja Pegawai)

Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Anggaran (Rp) | % Anggaran |
|----|--|---|-----------------------|---------------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian | 66.710.863.000 | 90,37 |
| 2. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel | Persentase Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah | 7.106.318.200 | 9,63 |
| | JUMLAH | | 73.817.181.200 | 100,00 |

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator sasaran. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program atau Kegiatan pada Tahun 2023 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, target dan capaian kinerja indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 8 yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama Tahun 2023.

Tabel 8. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target RPJMD | Realisasi |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------|
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Produksi Pertanian | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,61 - 4,36 | 5,17 |
| | | Peningkatan Produksi Pertanian | Persen | 2,00 | 3,02 |

Dari tabel di atas Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2023 tercapai melebihi target. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Tahun 2023 atas dasar harga berlaku adalah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 22,61 Persen (*Sumber. BPS Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2024*). Sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah, namun begitu terdapat **potensi penurunan kontribusi yang diiringi dengan laju pertumbuhan yang belum optimal**. Kondisi tersebut menjadi isu yang perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat dan terukur.

Sementara itu, untuk indicator kinerja sasaran peningkatan produksi pertanian pun telah tercapai melebihi target sebesar 3,02%. Peningkatan produksi pertanian yang dihitung merupakan komoditas strategis, berpengaruh terhadap inflasi dan merupakan unggulan local Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Komoditas-komoditas dimaksud adalah komoditas tanaman pangan yang terdiri dari padi, jagung, kedelai dan ubi kayu, komoditas hortikultura yaitu cabe, bawang merah, tomat, manggis, pepaya dan pisang serta komoditas perkebunan antara lain teh, kelapa, kopi, karet dan cengkeh.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang optimal baik dari sisi penyediaan benih/ bibit, pupuk, pestisida, alsintan, ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun. Selain itu peran dari penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM di bidang pertanian, meningkatkan pemahaman petani dalam berusaha tani juga memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian. Kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian juga mempengaruhi pencapaian kinerja sector pertanian. Dukungan dari Program/ Kegiatan Pusat dalam hal ini Kementrian Pertanian baik melalui alokasi APBN TA. 2023, DAK Fisik dan DAK Non Fisik TA. 2023, dan Program/ Kegiatan Provinsi Jawa Barat melalui alokasi APBD Provinsi Jawa Barat juga berperan banyak terhadap peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Sukabumi. Berikut Tabel Target dan Capaian Produksi Dinas Pertanian Tahun 2023

Tabel 9. Target dan Realisasi Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2023

| No. | Komoditas | Target Produksi | Realisasi Produksi |
|-----|--------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Padi | 739.707,00 | 772.946,00 |
| 2. | Jagung | 100.434,00 | 48.610,35 |
| 3. | Kedelai | 12.561,00 | 11.196,16 |
| 4. | Ubi Kayu | 187.138,00 | 189.500,10 |
| 5. | Cabe | 13.990,00 | 39.123,23 |
| 6. | Bawang Merah | 869,00 | 523,10 |
| 7. | Tomat | 16.152,00 | 20.172,40 |
| 8. | Manggis | 1.908,42 | 2.303,29 |
| 9. | Pepaya | 11.216,94 | 24.500,97 |
| 10. | Pisang | 107.568,08 | 141.604,30 |

| | | | |
|------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 11. | Teh | 2.969,66 | 2.902,82 |
| 12. | Kelapa | 84.416,65 | 65.214,75 |
| 13. | Kopi | 326,94 | 365,30 |
| 14. | Karet | 1.479,39 | 1.650,00 |
| 15, | Cengkeh | 2.294,97 | 1.169,37 |
| JUMLAH | | 1.283.032,05 | 1.321.782,13 |
| CAPAIAN KINERJA | | 3,02% | |

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026, sehingga terdapat perbedaan tujuan, sasaran strategis Dinas Pertanian antara Tahun 2021 dan 2022. Begitupun dengan indicator kinerja, dimana Tahun 2021 Indikator Kinerja Dinas Pertanian terdiri dari 2 Indikator yaitu Peningkatan Produksi Pertanian dan Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Agribisnis, sementara Indikator Kinerja Tahun 2022 hanya satu yaitu Peningkatan Produksi Pertanian. Realisasi Kinerja pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran | Target (%) | | Realisasi (%) | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Produksi Pertanian | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 2,30 - 3,30 | 3,61 - 4,36 | 5,12 | 5,17 |
| | | Peningkatan Produksi Pertanian | 2 | 2 | 6,6 | 3,02 |

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Renstra Dinas Pertanian

Capaian Kinerja Dinas Pertanian untuk Tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan stretegis Dinas Pertanian (Renstra 2021 sampai 2026) disajikan dalam table berikut :

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Kinerja Renstra Dinas Pertanian

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran | Target Akhir RPJMD/ RENSTRA (%) | Realisasi 2022 dan 2023 (%) | Tingkat Kemajuan (%) |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Produksi Pertanian | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,05-5,55 | 5,17 | 102,38 |
| | | Peningkatan Produksi Pertanian | 10 | 9,62 | 96,2 |

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Dinas Pertanian sampai dengan Tahun 2023 untuk periode RPJMD 2021 – 2026 dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi sudah tercapai 5,17% dengan kondisi kinerja akhir (target kinerja RPJMD 2021 – 2026) diangka 5,05 – 5,55%. Sementara itu indicator kinerja Peningkatan Produksi Pertanian yang merupakan IKU Dinas Pertanian sampai dengan Tahun 2023 sudah tercapai sebesar 96,2%. Hal ini sudah mendekati Target Kinerja Jangka Menengah 100%, sehingga sampai dengan 2026 diharapkan dapat dicapai.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pembangunan sector pertanian di Kabupaten Sukabumi yang ditunjukkan melalui kinerja positif Peningkatan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian, kinerja positif Peningkatan Produksi Pertanian tidak lepas dari dukungan Program, Kegiatan dan alokasi anggaran Tahun 2023 untuk sector pertanian.

Keberhasilan Peningkatan Kinerja Dinas Pertanian antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2014 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian yang mendukung terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang saat ini masih dalam tahap Revisi Perda.

2. Dukungan Kebijakan Pemimpin Daerah terhadap Pembangunan Sektor Pertanian seperti Kebijakan Prioritas pembangunan Infrastruktur di lahan-lahan LP2B, prioritas mengenai pemberian Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas pertanian antara lain :

- Penerapan teknologi yang efisien dan efektif dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian
- Pengembangan daerah sentra komoditi pangan, hortikultura dan perkebunan perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas mutu hasil dan rantai pemasaran yang efektif.
- Mendorong adanya petani milenial yang mampu mengelola sector pertanian agar lebih menguntungkan dan berdaya saing
- Peningkatan dukungan Infrastruktur pertanian di setiap subsector pertanian terutama di lokasi-lokasi LP2B
- Dukungan program terhadap proyek prioritas pembangunan pertanian, antara lain mendukung terhadap digitalisasi pertanian, penyediaan Biaya Operasional bagi Penyuluh Pertanian.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target-target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pertanian Tahun 2023

| No. | Sasaran | Indikator | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi (%) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MENINGKATNYA PRODUKSI PERTANIAN | Peningkatan Produksi Pertanian | 151 | 99,33 | 51,67 |

| No. | Sasaran | Indikator | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi (%) |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | 100 | 95,40 | 4,6 |
| 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | 100 | 99,81 | 0,19 |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi | 100 | 99,58 | 0,42 |
| 5 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian | 100 | 100,00 | 0 |
| 6 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | 100 | 99,05 | 0,95 |

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa Program-program yang mampu menggunakan sumberdaya nya secara efisien, efektif serta dapat mengoptimalkan kinerja nya ada 4 (empat) Program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Keempat Program ini mampu mencapai kinerja lebih maksimal (100%) dengan penggunaan input (anggaran) maksimal dan efisien. Sementara itu untuk Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat mengefisiensikan penggunaan sumberdaya sebesar 51,67%. Hal ini disebabkan karena Kinerja Utama Dinas Pertanian (Peningkatan Produksi) dipengaruhi tidak hanya oleh Program-program Kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, tetapi juga dipengaruhi oleh Program kerja

Pusat (Kementrian Pertanian) dan Program Kerja Dinas teknis sektor pertanian Provinsi Jawa Barat antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Pertanian dengan indikator sasaran peningkatan produksi pertanian didukung oleh 5 (Lima) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Subkegiatan, adapun capaian kinerja utama dinas dan capaian kinerja program nya sebagai berikut :

Tabel 13. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja/ Indikator Program | Kinerja | | |
|----|---|--|----------|-------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MENINGKATNYA PRODUKSI PERTANIAN | Peningkatan Produksi Pertanian | 2 | 3,02 | 151 |
| 2 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | 100 | 100 | 100 |
| 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | 100 | 100 | 100 |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi | 100 | 100 | 100 |
| 5 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian | 100 | 100 | 100 |
| 6 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | 100 | 100 | 100 |

Dengan IKU Dinas Pertanian tercapai 3,02% dibandingkan target 2%, kontribusi dari 5 Program dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Sukabumi terhadap pencapaian IKU sebesar 151 %. Selain didukung oleh sumber anggaran APBD

Kabupaten Sukabumi, keberhasilan capaian produksi pertanian Tahun 2023 juga tidak terlepas dari dukungan yang cukup besar melalui Program/ Kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN Dana Tugas Pembantuan baik yang berasal dari TP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat maupun Bantuan Pusat Kementerian Pertanian secara langsung juga Dana APBD Provinsi Jawa Barat.

Ketercapaian Program-program Dinas Pertanian Tahun 2023 secara lebih mendalam dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi ketersediaan pangan pokok padi pada Tahun 2023 naik sebanyak 78.592,79 ton GKG (+10,712%) dibanding dengan target produksi, hal ini disebabkan terjadi kenaikan luas panen terutama di wilayah Sukabumi Utara pada Wil. I, II dan III. Selain itu pada Tahun 2023 melalui Program Peningkatan Indeks Pertanaman 400 mengakibatkan tanam pada periode Apr – Sept 2023 mengalami peningkatan.
2. Realisasi produksi komoditas Jagung mengalami penurunan yang cukup tinggi, akibat dari penurunan Luas Panen, Penurunan Luas Tanam. Sedangkan komoditas kedelai penurunan Luas panen dan Luas tanam terjadi karena ketersediaan sarana produksi terutama benih unggul dan pupuk yang berasal dari Bantuan Pemerintah maupun swadaya masyarakat mengalami penurunan. Penurunan luas panen dan tanam komoditi jagung dan kedelai terutama juga disebabkan oleh penurunan bantuan/ fasilitasi Program Pemerintah Pusat yang berasal dari sumber anggaran APBN TP Provinsi Jawa Barat, karena budidaya kedua komoditas palawija ini masih tergantung dari bantuan/ fasilitasi Program Pemerintah. Capaian komoditas Ubi Kayu dengan sentra di Kec. Cikembar, Jampangtengah, Warungkiara, Pabuaran, Lengkong, Gegerbitung pun mengalami penurunan produksi.
3. Tahun 2023 sentra cabe berada di 48 desa terdiri dari 35 Desa cabe merah dan 13 desa sebagai sentra cabe rawit. Adapun desa-desa tersebut berada di kecamatan Gegerbitung, Sukalarang, Sukaraja, Sukabumi, Kadudampit, Cikembar, Nagrak, Caringin, Kabandungan, Cidahu, Cicurug, Simpenan, Lengkong, Nyalindung, Purabaya, Jampang Tengah, Kalibunder dan Pabuaran. Sentra Cabe cukup banyak karena harga jual produksinya yang cukup tinggi sehingga menguntungkan petani,

oleh sebab itu banyak petani yang menanam cabe untuk mendapat keuntungan hasil pertanian yang lebih baik. Bantuan dari Pemerintah Pusat ke daerah sentra diberikan dalam bentuk bantuan sarana produksi.

4. Pengembangan sentra bawang merah terutama difokuskan di wilayah selatan yaitu di kecamatan Simpenan, Jampangkulon, Ciracap, Cibitung, Kalibunder, Surade dan Pabuaran. Sebagai desa sentra ada 10 Desa yaitu Desa Loji Simpenan, Desa Pangumbahan, Ujunggenteng dan Cikanggung Kecamatan Ciracap, Desa Cibitung, Desa Padajaya Jampangkulon, Desa Pasir Ipis Surade, Desa Sukaluyu Kalibunder dan Desa Cibadak Pabuaran. Namun produksi bawang merah bila dibandingkan dengan target produksi Tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat tinggi sekitar 65,31 %, hal ini disebabkan adanya penurunan luas tanam dan dukungan cuaca yang kurang mendukung terhadap pertanaman bawang merah. Selain itu dengan harga bibit bawang merah yang tinggi, petani jarang yang melakukan penanaman karena sebagian besar petani bawang merah di Kabupaten Sukabumi masih tergantung terhadap bantuan Pemerintah. Saat ini dengan dukungan yang besar dari Kementrian Pertanian RI, pengembangan sentra produksi bawang merah di wilayah Sukabumi Utara (dataran tinggi) gencar dilakukan untuk peningkatan produksi bawang merah.
5. Sentra Komoditi Manggis berada di kecamatan Cicantayan, Cikembar, Gunungguruh, Jampang Tengah, Nyalindung, Gegerbitung, Palabuhanratu dan Cisolok. Rata-rata di masing masing kecamatan berkembang penanaman manggis di dua sampai tiga desa. Namun capaian produksi manggis dan pepaya mengalami Tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan target produksi, hal ini disebabkan kondisi cuaca yang musim hujan sepanjang tahun sehingga masa berbunga untuk tanaman tersebut lebih lama dan sedikit yang berakibat pada jumlah buah yang dihasilkan mengalami penurunan. Pada komoditas papaya terjadi serangan Prsv (*Papaya Ringspot Virus*) sehingga banyak tanaman papaya yang harus di eradikasi.
6. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu penghasil pisang potensial di Jawa Barat, dengan kualitas rasa yang enak dan manis. Hampir di setiap kecamatan

ditemukan tanaman pisang , dan bila dilihat dari luas tanam dan kontinuitas dalam produksi pisang pada 5 tahun terakhir ada 14 kecamatan yang bisa dikategorikan sebagai sentra pisang yaitu kecamatan Bantargadung, Palabuhanratu, Gegerbitung, Cikakak, Kalapanunggal, Cisolok, Warungkiara, Simpenan, Kabandungan, Bojong genteng, Sukabumi, Cidolog, Sagaranten, Cidahu dan Parakansalak.

7. Capaian produksi tanaman perkebunan jenis kopi dan karet dan mengalami peningkatan produksi. Sementara untuk jenis komoditas lainnya seperti the, kelapa, cengkeh mengalami penurunan produksi, penyebabnya antara lain kondisi cuaca yang kurang mendukung juga karena kondisi tanaman yang relative kurang produktif karena umur tanaman yang rata-rata sudah tua. Perkebunan besar terdiri dari Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN). Komoditi utama di PBS adalah Teh, Karet, Kelapa, Sawit, Kopi, Kakao dan cengkeh sedangkan di PTPN komoditinya terdiri dari Teh , Karet dan kelapa sawit. Pada perkebunan Rakyat komoditi utama berupa tanaman kepala dalam, hibrida, karet, dan teh.
8. Bunga dan daun potong masih didominasi oleh Krisan dan Dracaena. Sentra komoditinya berada di kecamatan Sukabumi, Sukaraja, Kadudampit, Cicurug dan Cidahu . Pengembangan sentra ini didukung dengan pembangunan *Greenhouse* dan fasilitasi sarana produksi. Namun dari target yang diinginkan masih belum optimal karena Pembangunan *Greenhouse* dengan perlengkapannya memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga petani masih kesulitan untuk memlaksanakan secara swadaya. Krisan dan Dracaena dari sisi pemasaran sudah cukup baik bahkan Dracaena sudah dapat menembus pasar ekspor.
9. Sentra komoditi biofarmaka terutama temulawak, jahe dan kunyit berada di kecamatan Nagrak, Cicantayan, Cidahu, Ciemas, Jampangkulon, Cidolog, Pabuaran dan Curugkembar. Daerah ini umumnya menjual hasil produksinya ke industri untuk bahan baku jamu dan ada kelompok seperti kelompok tani kemuning di kecamatan nagrak disamping budidaya juga bergerak diusaha pengolahan dan produknya sudah cukup berkembang luas.

10. Peningkatan produksi pertanian juga didukung dengan berkembangnya produk olahan dari komoditi unggulan palawija dan hortikultura di Kabupaten Sukabumi. Tahun 2023 teridentifikasi ada 55 kelompok tani yang bergerak pada pengolahan hasil pertanian. Melalui program dan kegiatan dari Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat fasilitasi alat pengolahan untuk meningkatkan kualitas hasil olahan dan pembinaan dari pihak yang berkompeten melalui Bintek maupun pelatihan. Produk olahan yang perkembangannya stabil adalah komoditas singkong dan pisang.
11. Dukungan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tercipta melalui penumbuhan kelompok tani/gabungan kelompok tani yang lebih berdaya saing dan memiliki nilai tawar dalam usahatani . Pada tahun 2023 data kelembagaan tani yang tercatat di Simluhtan terdapat 3.794 kelompok tani yang tergabung dalam 378 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Berdasarkan kategori kelas kelompok tani terdapat 921 kelompok pemula, 1.782 kelompok lanjut, 412 kelompok Madya dan 25 kelompok Utama.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi melalui anggaran APBD Kabupaten Sukabumi dengan total Belanja Daerah adalah sebesar Rp **95.499.205.423** sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp **94.677.349.028** atau dengan serapan dana APBD mencapai 99,14 %. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 penyerapan realisasi anggaran Dinas Pertanian sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi sisa anggaran adalah Silpa Rp 821.856.395. Hal ini selain merupakan upaya efisiensi / penghematan penggunaan anggaran sebagian besar berasal dari anggaran sisa kontrak.

Realisasi anggaran Tahun 2023 Dinas Pertanian untuk setiap Program Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi secara umum capaiannya tinggi, diatas 95%. Realisasi anggaran Program Tahun 2023 disajikan pada table berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Program Dinas Pertanian Tahun 2023

| No | Program | Indikator Kinerja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | 6.512.724.900,- | 6.213.136.877,- | 95,40 |
| 2. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase pra sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani | 55.562.963.000,- | 55.457.529.400,- | 99,81 |
| 3. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi | 150.575.000,- | 149.944.000,- | 99,58 |
| 4. | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian | 115.000.000,- | 115.000.000,- | 100,0 |
| 5. | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya | 4.369.600.100,- | 4.327.904.800,- | 99,05 |
| 6. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah | 28.788.342.423,- | 28.413.833.951,- | 98,70 |
| | JUMLAH | | 95.499.205.423 | 94.677.349.028 | 99,14 |

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pemerintah Tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Hasil evaluasi kinerja untuk sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian yaitu “Meningkatnya Produksi Pertanian”. Sasaran tersebut diukur melalui 1 (Satu) indicator kinerja, yaitu Persentase Peningkatan Produksi Pertanian.

Berdasarkan penilaian dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dikategorikan “tercapai”, dikarenakan capaian kinerja berdasarkan perbandingan target penetapan kinerja dibandingkan realisasi lebih besar dari 100%. Pencapaian sasaran dalam tahun 2023 secara umum telah dapat dicapai secara optimal.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Terkait dengan pencapaian sasaran kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 maka agar target indicator sasaran mendapat kategori yang diharapkan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas untuk Tahun 2023 maka perlu dilakukan :

1. Mendorong tumbuhnya petani *millenial*

2. Meningkatkan kualitas/mutu hasil pertanian melalui Bintek/Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi sarana pendukung serta adanya perbaikan rantai pemasaran yang lebih berpihak kepada petani.
3. Perlindungan lahan pertanian dengan adanya Revisi Perda LP2B, Perda RTRW.
4. Membangun lahan pertanian wilayah Sukabumi Selatan sebagai lahan pengganti untuk alih fungsi lahan pertanian terutama yang gencar terjadi di wilayah Sukabumi Utara.
5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian terutama pada lokasi LP2B, lokasi-lokasi potensi pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan local.
6. Memberikan fasilitas sarana produksi guna menekan biaya produksi dan akan meningkatkan produksi dan produktivitas lahan sehingga akan berdampak pada nilai tukar petani (NTP) yang pada akhirnya sector pertanian menjadi pilihan bisnis bagi para *millennial*.
7. Pendampingan oleh penyuluh pertanian pada setiap kelompok tani (poktan/gapoktan).

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI HASTUTY HARAHAP, SP., MSE., MA.**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**
Jabatan : **BUPATI SUKABUMI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Palabuhanratu, Februari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN,

SRI HASTUTY HARAHAP, SP., MSE., MA.

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Tahun Anggaran : 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---------------------------------|---|--------|----------------|--|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya produksi pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian | % | 2 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,5 0,5 0,5 0,5 |

| No | Program | Anggaran |
|------|---|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 24.549.633.446,00 |
| II. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. 6.477.704.900,00 |
| III. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. 56.490.878.000,00 |
| IV. | Program Pengendalian dan Pengendalian Bencana Pertanian | Rp. 156.575.000,00 |
| V. | Program Perizinan Usaha Pertanian | Rp. 115.000.000,00 |
| VI. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp. 4.366.100.100,00 |
| | JUMLAH | Rp. 92.155.891.446,00 |

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI,



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Palabuhanratu, Februari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN,



SRI HASTUTY HARAHAHAP, SP., MSE., MA.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI HASTUTY HARAHAP, SP, MSE, MA**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**
Jabatan : BUPATI SUKABUMI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI,

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Palabuhanratu, November 2023
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN,

SRI HASTUTY HARAHAP, SP, MSE, MA
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197410191999032008

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Tahun Anggaran : 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---------------------------------|---|--------|----------------|--|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya produksi pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Pertanian | % | 2 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,5 0,5 0,5 0,5 |

| No | Program | Anggaran |
|------|---|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 28.788.342.423,00 |
| II. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. 6.512.724.900,00 |
| III. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. 55.562.963.000,00 |
| IV. | Program Pengendalian dan Pengendalian Bencana Pertanian | Rp. 150.575.000,00 |
| V. | Program Perizinan Usaha Pertanian | Rp. 115.000.000,00 |
| VI. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp. 4.369.600.100,00 |
| | JUMLAH | Rp. 95.499.205.423,00 |

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI,



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

Palabuhanratu, November 2023
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN,



SRI HASTUTY HARAHAP, SP, MSE, MA
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197410191999032008